



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENJA PERUBAHAN

2023

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sehingga dapat tersusun.

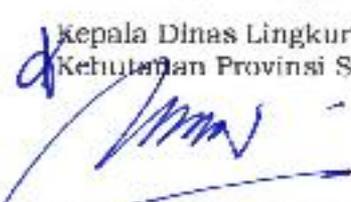
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, serta memperhatikan isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Terdapat dua tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan yang dijabarkan melalui sepuluh sasaran pembangunan. Dengan demikian rencana kerja ini untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) pada tahun 2023 agar sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dapat terwujud.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, tersusun dengan baik.

Makassar, Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan


Ir. ANDI HASBI, M.T
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 196504271992031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	6
2.1 Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel tahun 2020	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	33
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	35
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	59
3.3 Program dan Kegiatan.....	64
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	73
BAB V Penutup	85
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	85
5.2 Rencana tindak lanjut	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi sasaran urusan lingkungan Hidup tahun 2022	6
Tabel 2	Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan kehutanan Tahun 2022	7
Tabel 3	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 Triwulan II (TC-29).....	10
Tabel 4	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel (TC-30).....	24
Tabel 5	Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2022 (TC-31)	36
Tabel 6	Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.....	58
Tabel 7	Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2023.....	61
Tabel 8	Arah dan Kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023	62
Tabel 9	Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	63
Tabel 10	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	74s

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial tahun 2022	25
Diagram 2	Kelompok tani hutan tahun 2022.....	26
Diagram 3	Pelibatan masyarakat pada perhutanan sosial tahun 2022	27
Diagram 4	Polisi kehutanan.....	28
Diagram 5	Kerusakan kawasan hutan	29
Diagram 6	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	30
Diagram 7	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan	31
Diagram 8	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	32
Diagram 9	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan	32
Diagram 10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ..	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah jangka pendek (tahunan) merupakan menjabarkan perencanaan menengah pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, akses pengambilan kebijakan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 15 dan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan pada tahun 2023, yang memuat kebijakan anggaran daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan pengurangan anggaran program dan kegiatan.

Perubahan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, serta dinamika kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter.

Beberapa program strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dalam pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, dengan demikian dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah



(RKPD) Perubahan Tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan Tahun Anggaran 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan



18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
19. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
 - a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi maupun melalui DAK tahun 2023
 - b. Acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023
 - c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).



Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Rencana Kerja Perubahan serta kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 TRIWULAN II

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Pertimbangan dan arahan masukan terhadap pencapaian program kerja untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Triwulan II sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Triwulan II

Sesuai dengan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, meliputi urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan yang akan dicapai meliputi :

Urusan Lingkungan Hidup

Target dan realisasi sasaran urusan lingkungan hidup tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1

Target dan realisasi sasaran urusan lingkungan hidup tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
Meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan hidup	72,63	74,17	102,12
	2. Indeks kualitas air	54,72	57,79	105,61
	3. Indeks kualitas udara	88,97	90,35	101,55
	4. Indeks kualitas air laut	71,40	85,59	119,87
	5. Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan	57 %	57 %	100,00
	6. Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	25 %	27 %	108,00
Menurunnya emisi gas rumah kaca (sektor limbah)	7. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	0,24 %	0,40 %	167,00 %
Meningkatnya efektifitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun persampahan	8. Persentase penanganan sampah	49 %	51,15 %	104,39 %
	9. Persentase peningkatan penanganan limbah infeksius menjadi abu	100 %	100 %	100,00 %
	10. Persentase peningkatan pengelolaan limbah B3	75 %	98,64 %	131,52 %
Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	11. Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	42 %	42 %	100,00 %



Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
Meningkatnya tata Kelola lingkungan dan penerapan instrument lingkungan	12. Persentase Rekomendasi KLHS yang Diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100 %	100 %	100 %
	13. Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang Dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	14. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	70 %	59,10 %	84,43 %
	15. Nilai SAKIP OPD	85	70	81,94 %
	16. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97 %	110 %	113,00 %
	17. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98 %	98 %	100,00 %
	18. Persentase Temuan Material	0 %	0 %	100,00 %
Terpenuhinya Dukungan Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup	19. Persentase Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	105,65 %	106,65 %

Urusan Kehutanan

Tujuan dan sasaran urusan kehutanan meliputi

1. Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
 - Sasaran 1.1 : Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
 - Sasaran 1.2 : Meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Sasaran 1.3 : Meningkatkan akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati
 - Sasaran 1.4 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah
 - Sasaran 2.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Target dan realisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sesuai rencana kerja tahun 2022, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2

Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan Kehutanan tahun 2022

Urusan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen	
1. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan		Luas pengelolaan kawasan hutan kewenangan provinsi	1.780.029 ha	1.780.029 ha	100	
	1.1	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	58,66	55,46	94,54
	1.2	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel	0,07	0,05	71,43
			Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	75.387,35 ha	628,28
	1.3	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7,89 %	11,05 %	140,05
			Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15 %	27,08 %	180,56
	1.4	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %	105,46
			Jumlah kesatuan pengelolaan hutan	24 KPH	24 KPH	100
2. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Tingkat akuntabilitas kinerja	75 %	77 %	102,67	
	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	75	77	102,67
		Persentase ASN nilai Sakip kategori Baik	90 %	100 %	111,11	



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,20 %	109,11
		Persentase temuan material	2 %	0,0016 %	199,92

Adapun pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023, sampai dengan Triwulan II tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		9=(7/6)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(5+7+9)	12=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP									
2.11.01.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor									
2.11.01.6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan									
2.11.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										
2.11.01.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan									
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100,00	60,00	100,00	50,00	50,00	66,67 %	50,00	50,00
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH yang ditetapkan	dokumen	1,00	1,00	1,00	0,50	50,00	60 %	0,50	50,00
2.11.02.1.01.0002	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah tahapan penetapan RPPLH yang dilaksanakan	tahapan	3,00	0,00	1,00	0,50	50,00	3 dokumen	0,50	50,00
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi	dokumen	1,00	0,00	1,00	0,50	50,00	100 %	0,50	50,00
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS RPJMD yang dibuat dan dilaksanakan	dokumen	1,00	0,00	1,00	0,50	50,00	1 dokumen	0,50	50,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Ton penurunan emisi Co2 eq	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	15257.36 TonCO2e	0,00	0,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan Emisi GRK	ton	9929,00	0,00	9929,00	0,00	0,00	24 kabupaten/kota	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutu airnya	lokasi	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	3 dokumen	0,00	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	kab/kota	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	3 dokumen	0,00	0,00
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sampel yang diuji	sampel	4030,00	0,00	1100,00	933,00	84,82	1.200 dokumen	933,00	84,82
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	lokasi	7,00	2,00	3,00	2,00	66,67	1 lokasi	2,00	66,67
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah Lokasi yang dilaksanakan rehabilitasi	lokasi	0,00	0,00	3,00	2,00	66,67	1 kegiatan	2,00	66,67
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KeHaTi)	%	100,00	91,42	100,00	40,00	40,00	88,24 %	40,00	40,00
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keaneekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	jenis	350,00	325,00	350,00	335,00	95,71	375 jenis	335,00	95,71
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya dalam Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati	kebun raya	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	27 ha	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	%	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,65 %	0,00	0,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola	ton	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	2.200.000 ton	0,00	0,00
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3	perusahaan	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3 dokumen	0,00	0,00
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang diolah diincenerator	ton	1690,00	0,00	500,00	101,19	20,24	250 dokumen	101,19	20,24
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	40 %	0,00	0,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	60 usaha/ kegiatan	0,00	0,00
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	dokumen	39,00	0,00	7,00	0,00	0,00	10 dokumen	0,00	0,00
2.11.06.1.01.0003	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	150 badan usaha	0,00	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100,00	73,61	100,00	65,27	65,27	33,33 %	65,27	65,27
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	MHA dan kearifan lokal	19,00	18,00	19,00	17,00	89,47	5 MHA	17,00	89,47
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi Pengakuan MHA yang terkait PPLH	kegiatan	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5 dokumen	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	100,00	87,00	100,00	45,45	45,45	73,4 %	45,45	45,45
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	instansi, lembaga, organisasi	0,00	0,00	154,00	70,00	45,45	1.104 lembaga	70,00	45,45
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	kegiatan pendampingan	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	24 dokumen	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	penghargaan	100,00	111,00	138,00	14,00	10,14	88,23 %	14,00	10,14
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	rekomendasi	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	150 penghargaan	0,00	0,00
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	penilaian	10,00	0,00	10,00	14,00	140,00	150 entitas	14,00	140,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100 %	0,00	0,00
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjuti kasus/ perkara LH yang ditangani	rekomendasi	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30 rekomendasi	0,00	0,00
2.11.10.1.01.0001	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	pengaduan	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	15 pengaduan	0,00	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.10.1.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.	kegiatan	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	15 perkara	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	55 %	0,00	0,00
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30 %	0,00	0,00
2.11.11.1.01.0001	Penyusunan rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	Jumlah rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun	dokumen	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah	lokasi	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3 dokumen	0,00	0,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan										
03.28	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan										
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berenerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP	%	100,00	95,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50	50
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50	50
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2	100
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1	100
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4,00	2,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3	100
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4,00	1,00	4,00	2,00	50,00	4,00	2	50
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50	50



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	2529,00	2,00	821,00	872,00	106,21	821,00	872	106
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	3,00	1,00	3,00	1,00	33,33	3,00	1	33
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	54,00	18,00	14,00	6,00	42,86	14,00	6	43
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0	0
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0	0
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0	0
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00	1,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0	0
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah pendapata'n daerah	Rp	1172430000,00	180010000,00	1172430000,00	0,00	0,00	1172430000,00	0	0
3.28.01.1.04.0001	Perencanaan pengolahan retribusi daerah	Jumlah laporan Perencanaan pengolahan retribusi daerah	Laporan	2,00	1,00						
3.28.01.1.04.0002	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Laporan	2,00	1,00						
3.28.01.1.04.0003	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Laporan	2,00	1,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	%	90,00	95,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0	0%
3.28.01.1.05.0004	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	laporan	3,00	1,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0	0
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0	0
3.28.01.1.05.0006	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0	0
3.28.01.1.05.0007	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0	0



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0%
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	17,00	22,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	paket	20,00	2,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0	0
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6,00	4,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20,00	20,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0	0
3.28.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	60,00	15,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0%
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	16,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	16,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah unit Aset tetap lainnya yang diadakan	unit	16,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit Aset tak berwujud yang diadakan	unit	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0	0
3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	16,00	3,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50	50
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1	100
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1	100
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1826,00	371,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50	50
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	129,00	53,00	156,00	81,00	51,92	156,00	81	52
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20,00	3,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0	0



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	10,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0	0
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	115,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0	0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	61,66	71,14	65,47	2,20	3,36	61,66	2,20	3,36
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	m3	277009,36	114892,00	92336,62	5325195,00	5767,15	277009,36	5325195,00	5767,15
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	16,20	0,03	14,82	0,01	0,07	16,20	0,01	0,07
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	ton	210596,00	6664,87	283,00	3112,83	1099,94	210596,00	3112,83	1099,94
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	ha	1780029,00	1780029,00	1780029,00	1006832,00	56,56	1780029,00	1006832,00	56,56
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	dokumen	1,00	1,00	1,00		0,00	1,00		0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp	25000000,00	0,00	25000000,00	214538396,00	858,15	25000000,00	214538396,00	858,15
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	180,00	41,00	10,00	3,00	30,00	180,00	3,00	30,00
3.28.03.1.03.0009	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	lokasi	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	ha	1571,00	0,00	1571,00	312,70	19,90	1571,00	312,70	19,90
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	699,00	485,00	450,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	10,00	4,00	60,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun	unit	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0006	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	bibit	5000,00	27500,00	25000,00	202285,00	809,14	5000,00	202285,00	809,14



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	30,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	ha	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	1780029,00	549,00	1780029,00	890014,00	50,00	1780029,00	890014,00	50,00
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	178029,00	549,00	1780029,00	296671,00	16,67	178029,00	296671,00	16,67
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	laporan	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	48,00	19,00	6,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	jenis	3,00	0,00	3,00	2,00	66,67	3,00	2,00	66,67
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	unit managemen	5,00	0,00	3,00	1,00	33,33	5,00	1,00	33,33
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	m3	28155,17	0,00	28155,17	2907,00	10,32	28155,17	2907,00	10,32
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	5,00	1,00	30,00	5,00	16,67	5,00	5,00	16,67
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	pemohonan	95,00	0,00	95,00	22,00	23,16	95,00	22,00	23,16
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	laporan	14,00	0,00	14,00	5,00	35,71	14,00	5,00	35,71
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	sertifikat	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	sertifikat	7,00	0,00	7,00	22,00	314,29	7,00	22,00	314,29
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	jenis	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	penangkar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	laporan	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	16,55	26,80	16,76	28,26	168,62	16,55	28,26	168,62
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	orang	200,00	115,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	169,00	72,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	ha	2000,00	0,00	2000,00		0,00	2000,00		0,00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di provinsi sulawesi selatan	DAS	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	dokumen	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	dokumen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	lembaga	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00



Berdasarkan tabel 3 di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 triwulan II, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program pengelolaan hutan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- a. Indeks kualitas tutupan lahan
- b. Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel
- c. Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi
- d. Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya
- e. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Adapun indikator program pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi
- b. Persentase kerusakan hutan per tahun
- c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan
- d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Pencapaian indikator Program Pengelolaan Hutan diuraikan sebagai berikut:

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi

Luas lahan kritis di Sulawesi Selatan masih terdapat ± 389.427 ha dengan tingkat kekritisannya sangat kritis dan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur pada UU No. 23 tahun 2014, namun pelaksanaan rehabilitasi lahan tersebut sangat ditentukan partisipatif masyarakat karena sasaran lokasi berada pada tanah milik masyarakat yang bersifat privat, sehingga diperlukan sinergitas dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Indikator cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi merupakan salah satu upaya pembentuk tutupan lahan bervegetasi pohon dan akan menjadi faktor pembentuk indeks kualitas tutupan lahan. Luas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2023 triwulan II masih nihil. Rehabilitasi lahan akan dilaksanakan berupa pembuatan hutan rakyat



pada bulan oktober-desember 2023 dimana diperkirakan musim hujan sudah merata pada beberapa daerah dengan intensitas curah hujan tinggi. Keberhasilan penanaman hutan rakyat berpengaruh pada ketersediaan air untuk proses pertumbuhan tanaman.

b. Persentase kerusakan hutan per tahun

Kerusakan hutan masih menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk menurunkan atau meminimalisasi tingkat kerusakannya. Kerusakan hutan di Sulawesi Selatan masih disebabkan oleh kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kerusakan hutan akan mempengaruhi fungsi dan kawasan hutan baik secara fisik maupun kimia tanah sehingga berdampak pada produktifitas hutan. Kerusakan kawasan hutan tahun 2023 Triwulan II yang diakibatkan Kejadian kerusakan kawasan tahun 2023 triwulan II yaitu nihil

c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan

Produksi hasil hutan kayu olahan merupakan penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi kayu olahan Triwulan II tahun 2023 sebesar 7.664,2668 m³. Produksi kayu olahan tersebut yaitu produksi veneer sebesar 3.080,5154 m³, produksi kayu gergajian sebesar 4.583,7514 m³.

d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Produksi hasil hutan bukan kayu juga penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu sebesar triwulan II tahun 2023 sebanyak 2.694,393 ton bersumber dari produksi getah pinus sebanyak 2.201,961 ton dan produksi rotan sebanyak 492,432 ton.

2. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya :

Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata

Adapun indikator Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya adalah jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak



dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata.

Pencapaian Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya triwulan II tahun 2023 masih nihil, dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2023

3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan responsive gender melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dan menjadi progam nasional dengan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam jangka waktu tertentu dengan azas kelestarian dan keberlanjutan hutan. Akses pengelolaan hutan tersebut terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.

Indikator program Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan yaitu persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan.

Capaian program ini tahun 2023 triwulan II masih nihil, dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV



4. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mendukung pencapaian sasaran rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator indeks kualitas tutupan lahan.

Adapun indikator kinerja program Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah jumlah DAS yang direhabilitasi.

Capaian program Daerah Aliran Sungai tahun 2023 triwulan II masih nihil, dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 triwulan II memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :

1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada tahun 2023 triwulan II memberi kontribusi sebesar 23,23 % dengan pertumbuhan) sebesar 2,16 %.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran urusan kehutanan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94, tahun 2019 sebesar 58,06, tahun 2020 sebesar 55,10 tahun 2021 sebesar 55,40, dan tahun 2022 sebesar 55,46

Kualitas tutupan lahan yang baik ditandai adanya mayoritas luasan tutupan lahan vegetasi pada suatu daerah. Kondisi tutupan lahan sangat tergantung pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dan langkah preventif perusakan kawasan hutan dan hasil hutan.

3. Kerusakan kawasan hutan

Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke



dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 diindikasikan terjadi seluas 498,21 ha yang tersebar pada 11 kabupaten/kota

4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan masih bergantung pada potensi hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis usaha kelola kawasan memungkinkan dikembangkan seperti pengolahan aren, kopi, dan madu. Masyarakat sekitar hutan tergabung secara berkelompok dengan membuat kelompok tani hutan dalam menjalankan kelola usaha dan kelola kawasan secara legal melalui perhutanan sosial. Perkembangan izin perhutanan sosial terus mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial masih diminati masyarakat sekitar hutan karena memberikan akses legal dalam mengelola hutan tanpa ada kekhawatiran lagi.

Izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial pada tahun 2018 seluas 52.529,22 ha, tahun 2019 seluas 80.425,79 ha, tahun 2020 seluas 161.133,22 ha, tahun 2021 seluas 175.802,42 ha, tahun 2022 seluas 196.745,33 ha

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :



Tabel 4 (TC_30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan Kehutanan											
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	15,65	16,25	16,76	27	20,12	26,80	16,76	27	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%	17,59	16,20	14,82	0,02	0,08	0,03	14,82	0,029	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%	57,91	61,60	65,47	72,00	65,61	71,14	65,47	72,00	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,06	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,08	0,05	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	
	Urusan Lingkungan Hidup											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	72,25	72,63	72,84	73,57	73,23	74,17	72,84	73,57	
2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		%			73,84	60	80	61,97	73,84	60	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

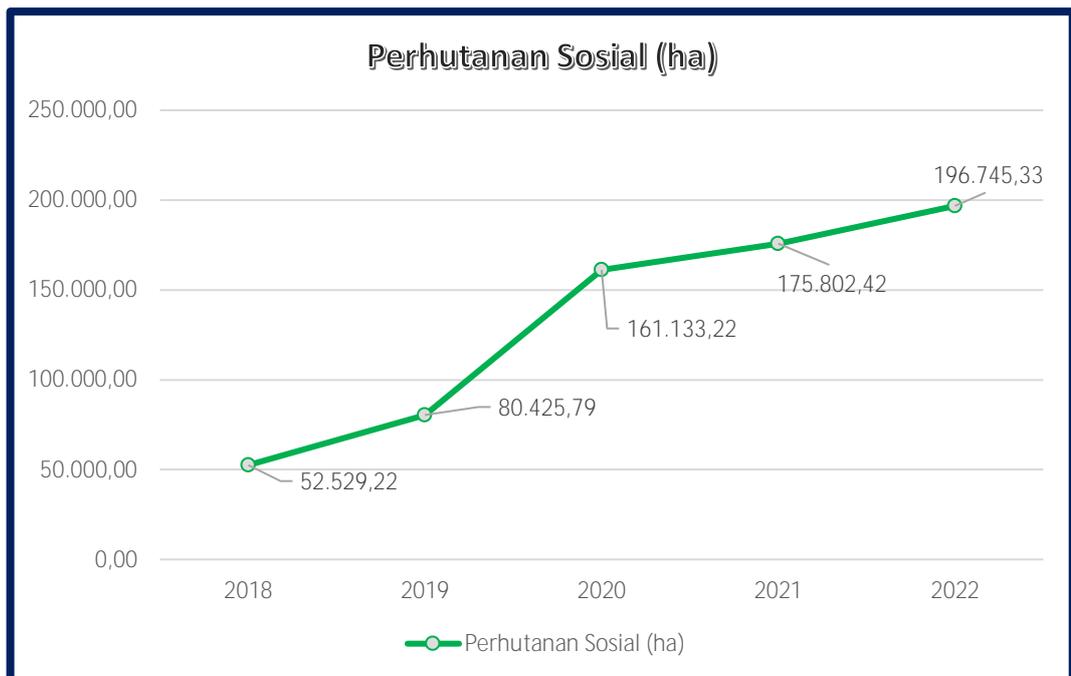
Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 mencapai 196.745,33 ha atau 11,05 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 1

Perkembangan perhutanan sosial 2022



Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan



Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 505 kelompok tani.

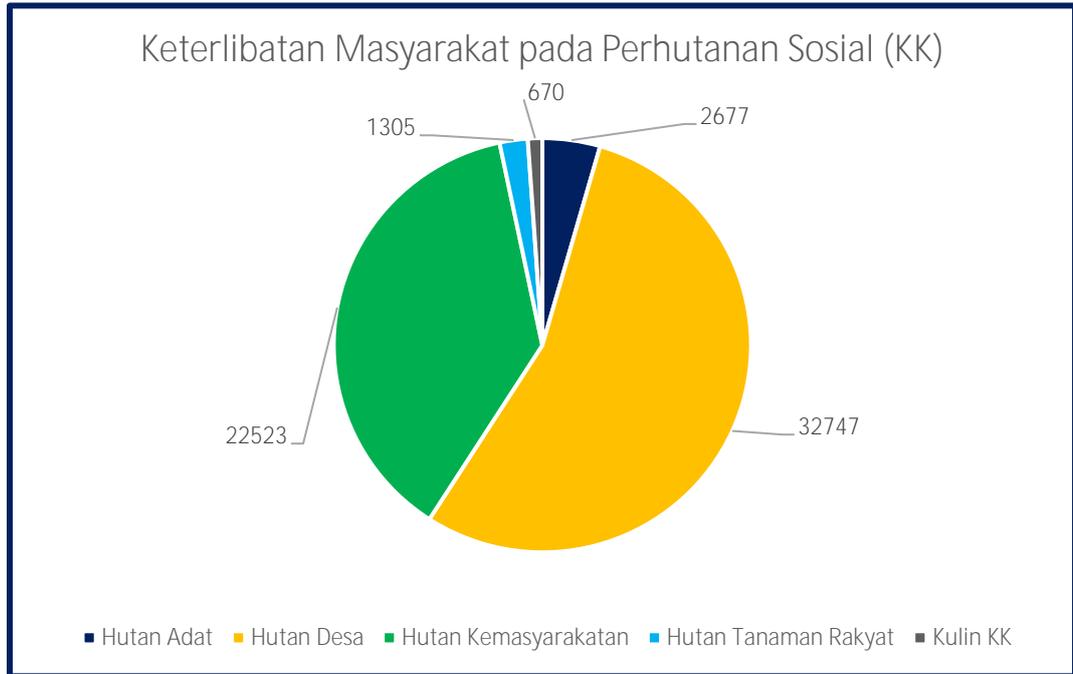
Diagram 2
Kelompok Tani Hutan Tahun 2022



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran masyarakat memafaatkan akses mengelola hutan semakin besar dan secava legal, yang tentunya partisipasi aktif ini diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan. Pada tahun 2022 jumlah KK yang terlibat dalam perhutanan sosial mencapai 59.922 KK mencakup luas garapan seluas 196.745,33 ha.



Diagram 3
Pelibatan Masyarakat pada Perhutanan Sosial Tahun 2022



Keterlibatan masyarakat tersebut diatas melakukan kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan sangat ditentukan dari pelibatan tenaga penyuluh kehutanan, local champion PS dan PKSM. Pelibatangannya berperan dalam pendampingan dan penyuluhan untuk peningkatan mutu dan akses pasar yang lebih luas. Jumlah tenaga penyuluh kehutanan masih sangat terbatas jika dibanding dengan jumlah kelompok dan aksesibilitas lokasi, sehingga pendampingan kelompok dibantu oleh tenaga local champion, dan PKSM.

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

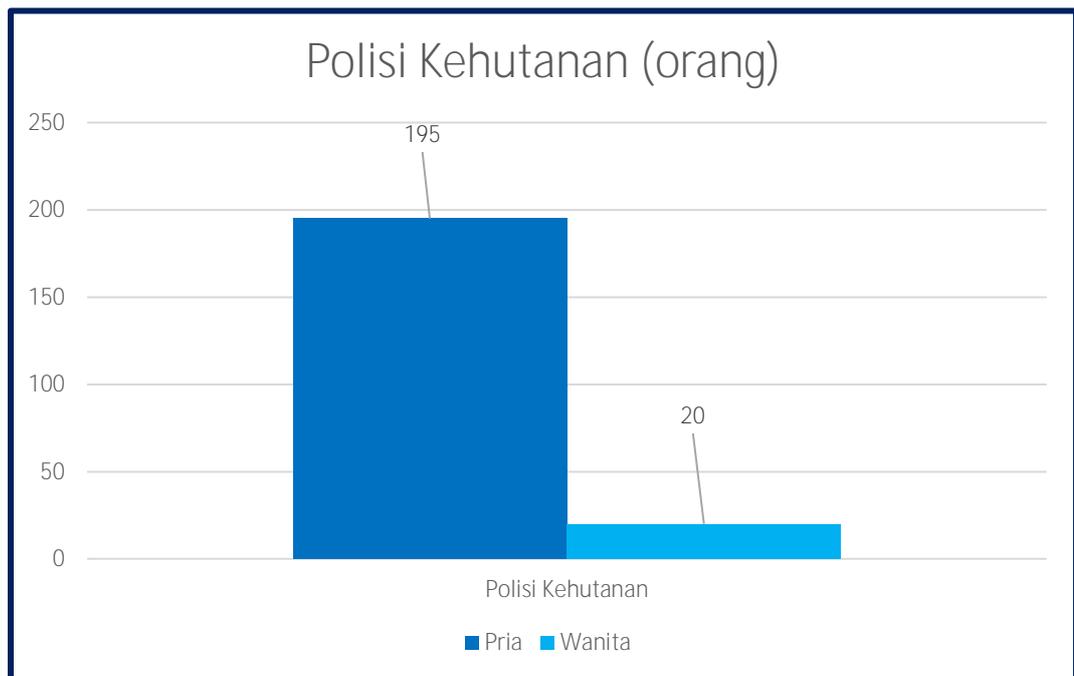
Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada. Upaya preventif perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan secara rutin oleh polisi kehutanan dengan



melakukan patroli pengamanan hutan sekaligus memberikan edukasi, sosialisasi batas-batas kawasan hutan.

Pengarusutamaan gender dalam aktivitas patroli pengamanan hutan melibatkan polisi kehutanan pria dan polisi kehutanan wanita, dengan tugas melakukan pengendalian, pembatasan kerusakan hutan. Jumlah polisi kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 triwulan II berjumlah 215 orang dengan rincian sebagai berikut :

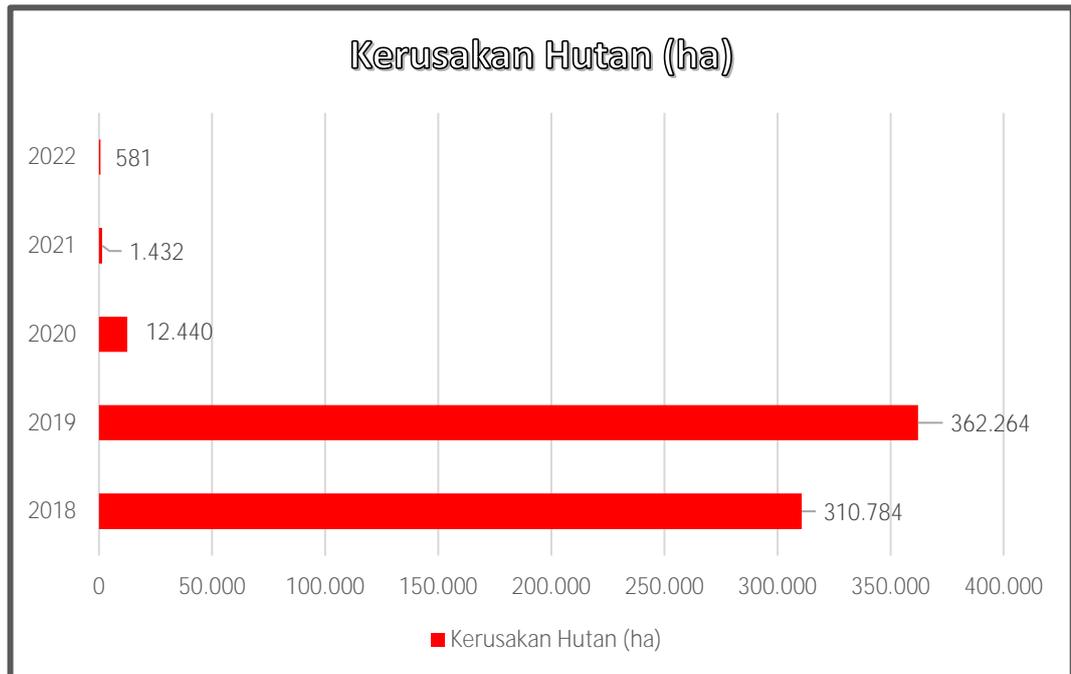
Diagram 4
Polisi Kehutanan Tahun 2023



Kejadian kerusakan hutan disebabkan pemanfaatan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging, dengan perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :



Diagram 5
Kerusakan Kawasan Hutan



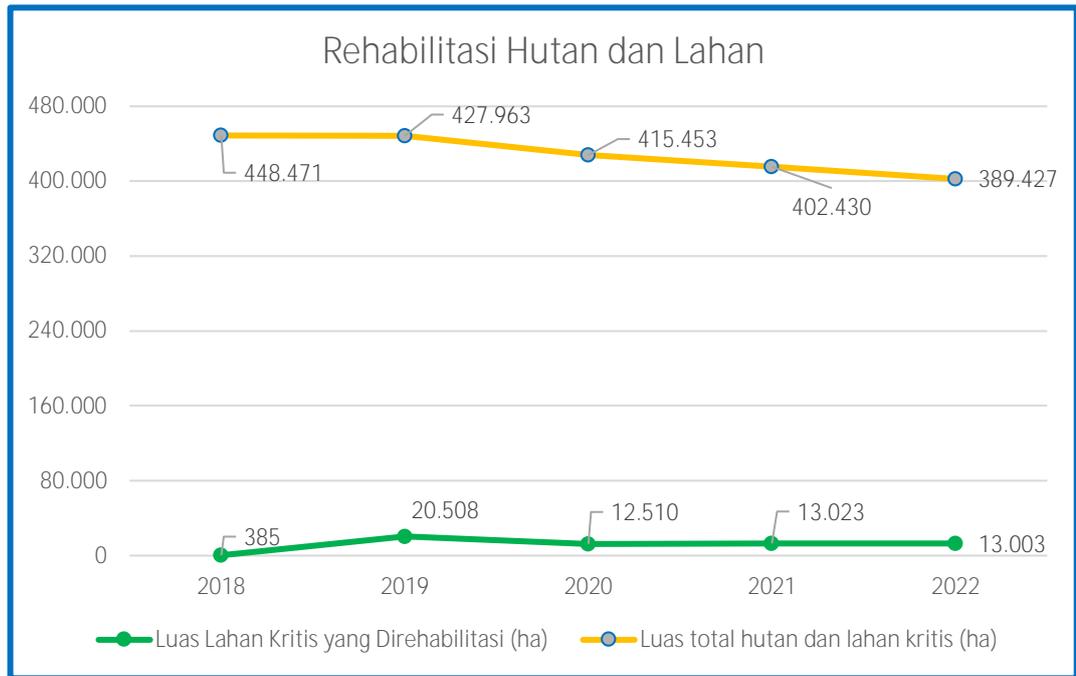
Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan pada tahun 2022 seluas 580,79 ha mengalami penurunan dari 1.432 ha pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 389.427 ha pada tahun 2022. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :



Diagram 6
Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

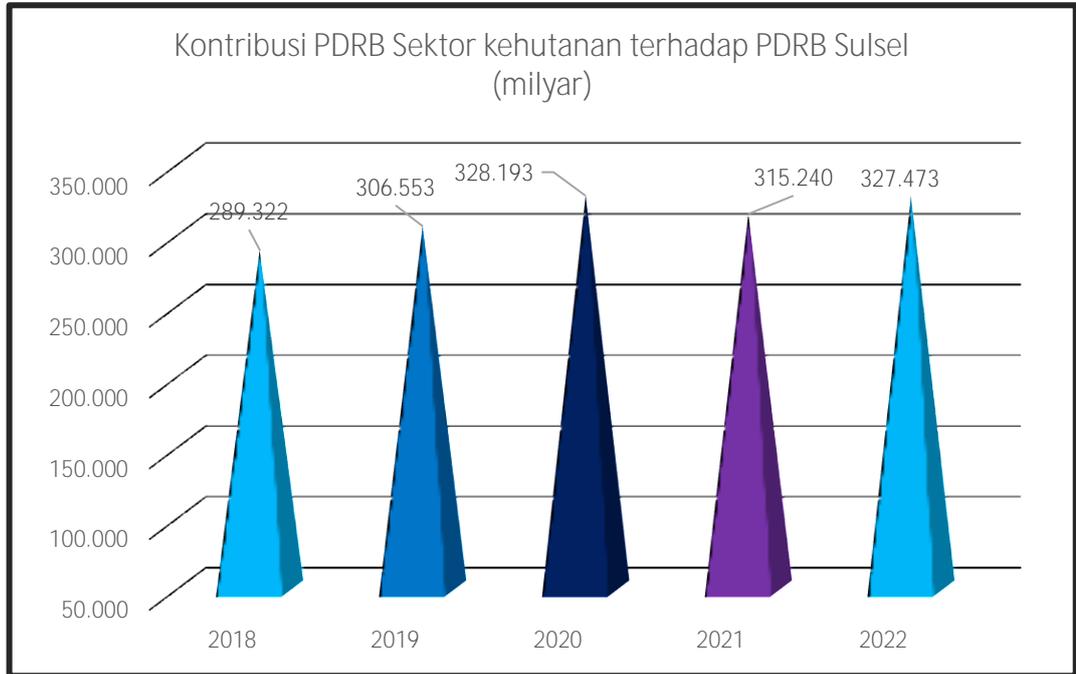
Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen, tahun 2019 tetap 0,06 persen, pada tahun 2020 sebesar 0,06 dan tahun 2021 sebesar 0,6 %. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 328.192,82 milyar. Pada tahun 2021 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar. Tahun 2022 kontribusi PDRB sektor kehutanan sebesar



327.473 milyar. Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

Diagram 7
Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan



5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan
Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2022 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :



Diagram 8

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

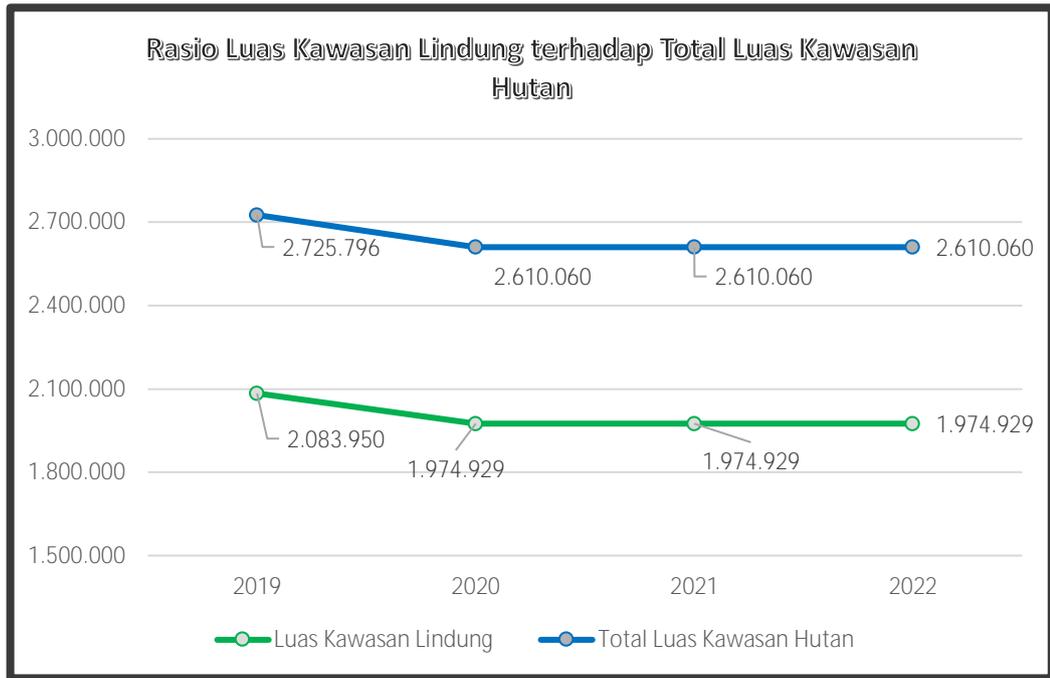
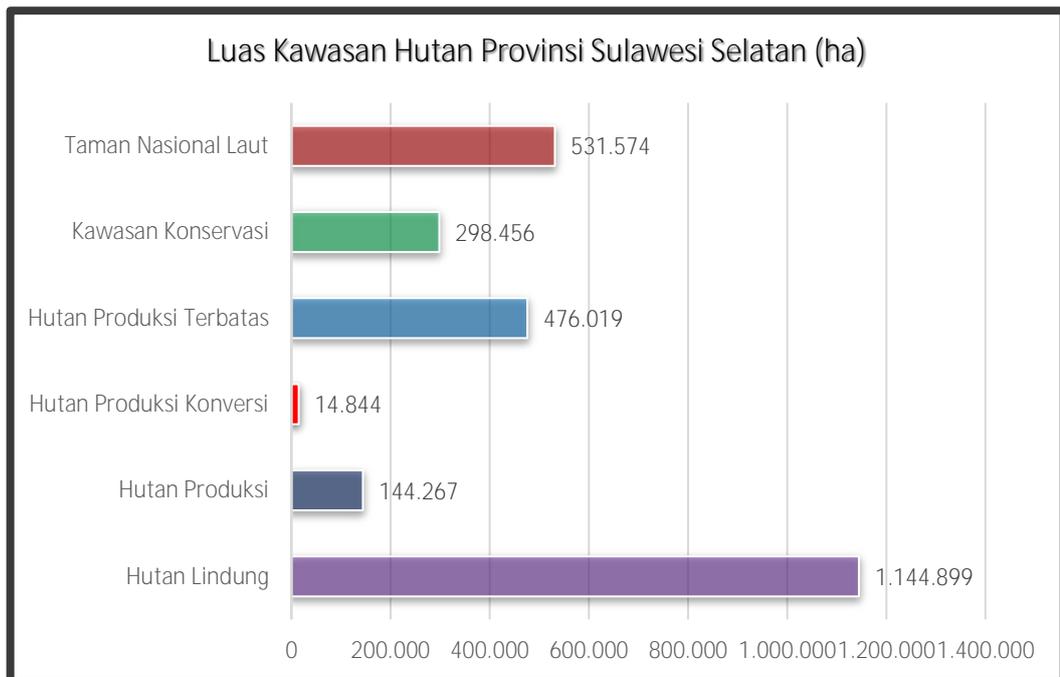


Diagram 9

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan

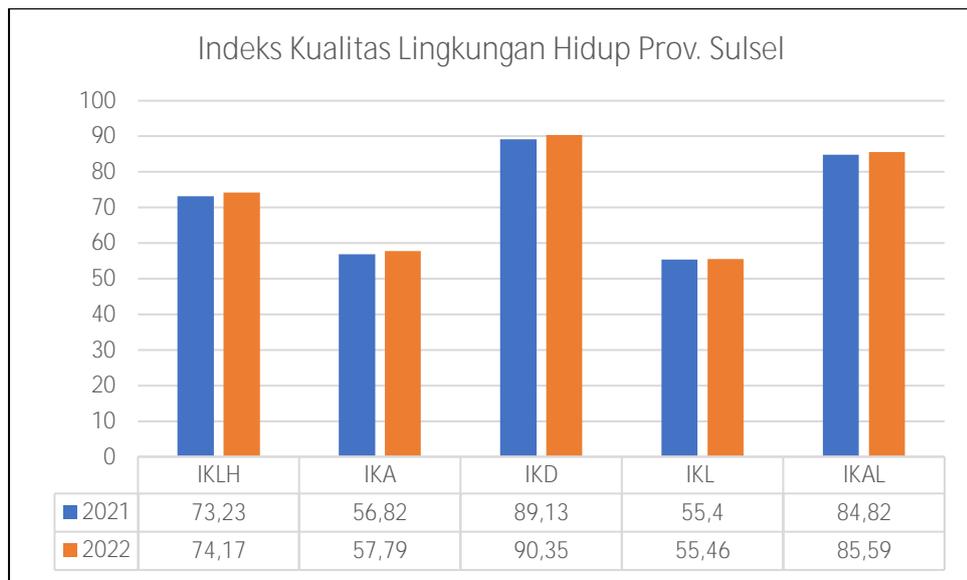




6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa



lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging

4. Masih adanya kasus illegal logging, kebakaran hutan, perladangan berpindah

5. Masih rendahnya daya saing (kualitas dan kuantitas) produk kehutanan yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan

6. Penanganan sampah dan perbaikan kualitas udara perkotaan

7. Peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik serta proses industri bersih dan ramah lingkungan

8. Pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali,

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor kehutanan antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;

3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Pencemaran lingkungan dengan meningkatnya beban pencemaran pada Daerah Aliran Sungai dan emisi ke udara ambient

6. Penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5 (TC-31)

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Program/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Program/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				6.012.232.455	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				6.012.232.455	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP	100%	3.671.972.275	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP	100%	3.671.972.275	
2.11.01.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	42.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	42.500.000	
2.11.01.6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulsel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	42.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulsel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	42.500.000	
2.11.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				3.629.472.275	Peningkatan Pelayanan BLUD				3.629.472.275	
2.11.01.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Makassar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.629.472.275	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Makassar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	3.629.472.275	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	570.562.500	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	570.562.500	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH yang ditetapkan	1 dokumen	343.534.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH yang ditetapkan	1 dokumen	343.534.000	
2.11.02.1.01.0002	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Sulsel	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH provinsi yang disusun	1 dokumen	343.534.000	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Sulsel	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH provinsi yang disusun	1 dokumen	343.534.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi	1 dokumen	227.028.500	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi	1 dokumen	227.028.500	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sulsel	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 dokumen	227.028.500	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sulsel	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 dokumen	227.028.500	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,4 Ton penurunan emisi Co2 eq	544.200.480	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,4 Ton penurunan emisi Co2 eq	544.200.480	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah penurunan Emisi GRK	9.929 ton	473.316.180	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah penurunan Emisi GRK	9.929 ton	473.316.180	
2.11.03.1.01.00.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sulsel	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	161.656.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sulsel	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	161.656.100	
2.11.03.1.01.00.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	50.000.000	
2.11.03.1.01.00.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Sulsel	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	261.660.080	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Sulsel	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	261.660.080	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	3 lokasi	70.884.300	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	3 lokasi	70.884.300	
2.11.03.1.03.00.09	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Sulsel	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	70.884.300	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Sulsel	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	70.884.300	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100%	40.171.700	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100%	40.171.700	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	350 jenis	40.171.700	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	350 jenis	40.171.700	
2.11.04.1.01.00.03	Pengelolaan Kebun Raya	Maros	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 ha	40.171.700	Pengelolaan Kebun Raya	Maros	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 ha	40.171.700	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Cakupan limbah yang dikelola	98%	469.897.800	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Cakupan limbah yang dikelola	98%	469.897.800	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah limbah B3 yang dikelola	4500000 ton	469.897.800	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah limbah B3 yang dikelola	4500000 ton	469.897.800	
2.11.05.1.01.00.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sulsel	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	34.104.600	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sulsel	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	34.104.600	
2.11.05.1.01.00.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 dokumen	435.793.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 dokumen	435.793.200	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26%	142.853.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26%	142.853.400	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17 usaha/ kegiatan	142.853.400	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17 usaha/ kegiatan	142.853.400	
2.11.06.1.01.00.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Sulsel	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	7 dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Sulsel	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	7 dokumen	50.000.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
2.11.06.1.01.003	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Sulsel	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah provinsi	65 laporan	92.853.400	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Sulsel	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah provinsi	65 laporan	92.853.400	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	40.718.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	40.718.000	
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	19%	40.718.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	19%	40.718.000	
2.11.07.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	40.718.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	40.718.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100%	102.945.400	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100%	102.945.400	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	154 Instansi, Lembaga dan Organisasi	102.945.400	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	154 Instansi, Lembaga dan Organisasi	102.945.400	
2.11.08.1.01.002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sulsel	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	102.945.400	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sulsel	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	102.945.400	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	138 penghargaan	108.371.600	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	138 penghargaan	108.371.600	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	5 rekomendasi	108.371.600	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	5 rekomendasi	108.371.600	
2.11.09.1.01.00.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sulsel	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	138 entitas	108.371.600	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sulsel	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	138 entitas	108.371.600	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	126.004.600	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	126.004.600	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah rekomendasi tindakan lanjut kasus/ perkara LH yang ditangani	20 rekomendasi	126.004.600	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah rekomendasi tindakan lanjut kasus/ perkara LH yang ditangani	20 rekomendasi	126.004.600	
2.11.10.1.01.00.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi	Sulsel	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	20 dokumen	73.750.800	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi	Sulsel	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	20 dokumen	73.750.800	
2.11.10.1.01.00.02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Sulsel	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	14 dokumen	52.253.800	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Sulsel	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	14 dokumen	52.253.800	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	74%	194.534.700	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	74%	194.534.700	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional	100%	194.534.700	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional	100%	194.534.700	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
2.11.11.1.01.00 01	Penyusunan rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	Sulsel	Jumlah dokumen rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun dan ditetapkan	0 dokumen	46.440.600	Penyusunan rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	Sulsel	Jumlah dokumen rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun dan ditetapkan	0 dokumen	46.440.600	
			Jumlah laporan rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun	1 laporan				Jumlah laporan rencana,kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun	1 laporan		
2.11.11.1.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 dokumen	148.094.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Sulsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 dokumen	148.094.100	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					Urusan Pemerintahan Pilihan					
03.28	Urusan Pemerintaha Bidang Kehutanan				90.544.604.118	Urusan Pemerintaha Bidang Kehutanan				90.544.604.118	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP	100%	84.190.967.718	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP	100%	84.190.967.718	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	605.137.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	605.137.700	
3.28.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	275.719.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	275.719.900	
3.28.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	88.673.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	88.673.700	
3.28.01.1.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	10.744.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	10.744.700	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	14.227.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	14.227.800	
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	19.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	19.080.000	
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	16.439.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	16.439.800	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	180.251.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	180.251.800	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	68.977.444.611	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	68.977.444.611	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	821 orang/bulan	68.733.232.111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	821 orang/bulan	68.733.232.111	
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	500.000	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	107.032.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	107.032.300	
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	70.176.400	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	70.176.400	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	66.503.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	66.503.800	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	420.555.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	420.555.200	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	359.571.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	359.571.000	
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	59.084.200	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	59.084.200	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	900.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	900.000	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	1.000.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90%	60.611.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90%	60.611.800	
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	60.611.800	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	60.611.800	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	2.342.348.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	2.342.348.800	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 jenis	52.545.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 jenis	52.545.000	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	26 paket	4.729.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	26 paket	4.729.500	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 paket	411.764.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 paket	411.764.700	
3.28.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket	411.475.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket	411.475.000	
3.28.01.1.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	40.362.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	40.362.000	
3.28.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	1.382.907.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	1.382.907.400	
3.28.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 dokumen	38.565.200	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 dokumen	38.565.200	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	114.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	114.950.000	
3.28.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	50.000.000	
3.28.01.1.07.00 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang Disediakan	23 unit	44.950.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang Disediakan	23 unit	44.950.000	
3.28.01.1.07.00 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 unit	20.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.842.892.569	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.842.892.569	
3.28.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	821.850.172	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	821.850.172	
3.28.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	488.213.499	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	488.213.499	
3.28.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	7.532.828.898	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	7.532.828.898	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	2.827.027.038	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	2.827.027.038	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	1.686.563.560	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	1.686.563.560	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	507.063.478	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	507.063.478	
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	4.750.000	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	4.750.000	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	57.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	57.850.000	
3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	10.000.000	
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	20.000.000	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	510.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	510.800.000	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	30.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,67%	5.700.399.900	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,67%	5.700.399.900	
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92336 m3				Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92336 m3		
			Persentase Kerusakan Hutan pertahun	14,82%				Persentase Kerusakan Hutan pertahun	14,82%		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton				Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton		
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	32.480.000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	32.480.000	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 dokumen	32.480.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 dokumen	32.480.000	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp.25000000	408.336.600	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp.25000000	408.336.600	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Bone, Gowa, Maros	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen	60.816.600	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Bone, Gowa, Maros	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen	60.816.600	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Bone, Gowa, Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 dokumen	47.520.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Bone, Gowa, Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 dokumen	47.520.000	
3.28.03.1.03.0009	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Bone	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	1 lokasi	300.000.000	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Bone	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	1 lokasi	300.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha	3.375.593.900	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha	3.375.593.900	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen	48.437.200	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen	48.437.200	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 ha	1.954.575.000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 ha	1.954.575.000	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 ha	498.750.000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 ha	498.750.000	
3.28.03.1.04.0006	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	25.000 batang	654.314.500	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	25.000 batang	654.314.500	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan	46.222.200	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan	46.222.200	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Takalar, Wajo, Palopo, Luwu Timur	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 ha	173.295.000	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Takalar, Wajo, Palopo, Luwu Timur	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 ha	173.295.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100%	1.597.965.200	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100%	1.597.965.200	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	1.378.195.200	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	1.378.195.200	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	91.900.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	91.900.000	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 laporan	75.880.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 laporan	75.880.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Sulsel	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	51.990.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Sulsel	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	51.990.000	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 izin	67.009.200	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 izin	67.009.200	
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 unit manajemen	67.009.200	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 unit manajemen	67.009.200	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,17 m3	60.190.000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,17 m3	60.190.000	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sulsel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 dokumen	60.190.000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sulsel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 dokumen	60.190.000	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	158.825.000	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	158.825.000	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Toraja Utara	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 unit usaha	58.965.000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Toraja Utara	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 unit usaha	58.965.000	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jeneponto, Luwu, Maros, Pinrang, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 sertifikat	49.930.000	Sertifikasi Sumber Benih	Jeneponto, Luwu, Maros, Pinrang, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 sertifikat	49.930.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Imdikatif	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Gowa, Jeneponto, Maros, Pinrang, Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	7 sertifikat	49.930.000	Sertifikasi Mutu Bibit	Gowa, Jeneponto, Maros, Pinrang, Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	7 sertifikat	49.930.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	63.406.800	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	63.406.800	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	63.406.800	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	63.406.800	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan	63.406.800	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan	63.406.800	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76%	414.560.700	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76%	414.560.700	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	414.560.700	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	414.560.700	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.28.05.1.01.00 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Parepare, Palopo, Luwu Timur	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 orang	135.819.700	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Parepare, Palopo, Luwu Timur	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 orang	135.819.700	
3.28.05.1.01.00 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Palopo, Luwu Timur	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	169 kelompok	138.201.800	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Palopo, Luwu Timur	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	169 kelompok	138.201.800	
3.28.05.1.01.00 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Wajo, Parepare, Palopo, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 ha	140.539.200	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Wajo, Parepare, Palopo, Luwu Timur, Toraja Utara	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 ha	140.539.200	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	175.269.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	175.269.000	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang direhabilitasi	4 DAS	175.269.000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang direhabilitasi	4 DAS	175.269.000	
3.28.06.1.01.00 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 dokumen	77.453.500	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 dokumen	77.453.500	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.28.06.1.01.00 02	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Makassar	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 dokumen	77.948.500	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Makassar	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 dokumen	77.948.500	
3.28.06.1.01.00 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 lembaga	19.867.000	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 lembaga	19.867.000	
JUMLAH					96.556.836.573					96.556.836.573	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2023 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat



4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
 - a. Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a.1 Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran:
 - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rancangan Tema RKP tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

Prioritas Nasional



Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan



manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

3.1.2.1 Arah kebijakan pembangunan wilayah tahun 2023

Arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 meliputi :

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan
2. Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah

Strategi Pengembangan Wilayah

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi, serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Sasaran Pengembangan Wilayah

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 difokuskan pada (1) Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan sektor unggulan; (2) penurunan tingkat kemiskinan melalui percepatan pemenuhan SPM; (3) peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial



ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2023.

Indikator	Target Tahun 2023					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,30	8,30	8,10	8,60	7,80	6,40
Tingkat Kemiskinan (%)	5,93	11,85	6,75	8,15	13,65	7,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	2,80	4,50	2,80	2,40	2,30

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

3.1.2.2 Arah kebijakan Pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2023

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi mengarah pada :

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan yang relative tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
2. Memantapkan perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur
3. Mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah
4. Mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional
5. Memperkuat mitigasi bencana dan pemulihan pasca bencana

Gambaran integrasi pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi digambarkan dalam peta pengembangan wilayah sebagai berikut :



3.1.2.3 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait pembangunan sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun sasaran strategis kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan



- dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2023
Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,48
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	17,38
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,33
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	67
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	230
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Values</i>)	Juta ha	12,10



IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2023
Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp trilyun	112
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US \$ Milyar	15
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp trilyun	5,4
Sasaran 3 : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
10	Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	9
11	Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ribu ha	600
12	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	750.000
Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Poin	2,5
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Kasus	2.962
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,65

3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus



dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Tahun 2023 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

" Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter"

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Penetapan sasaran pembangunan dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 merupakan upaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2023, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3
Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	RKPD Tahun 2023	Target P-RPMD	RPJMN	
1	Pematapan Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Haruf/ angka	A (81 - 90)	A (81 - 90)	
			2	Nilai SAKIP Provinsi	Haruf/ angka	A (>80 - 90)	A (>80 - 90)	
			3	Indeks Pelayanan Publik	Haruf/ angka	A (4,51 - 5,0)	A (4,51 - 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,607	0,607	
			5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Penguatan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	6	PDRD Perkapita ADRB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7	Tingkat Kesehatan	%	7,45	7,45	6,75
			8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	5,69	4,5
4	Pencururan kesenjangan sosial ekonomi	Mencurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,391	0,391	
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan Meningkatnya akuntabilitas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	10	IPM	Angka	73,05	73,05	
			11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
			12	Indeks Kesehatan	Angka	77,86	77,86	
			13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	79,28	79,28	
			14	Angka Inklusivitas	Ratus	24,438	24,438	
6	Pembertayaan ekonomi kegiatan usaha berbasis komoditas	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah Meningkatnya efisiensi ekonomi sektor unggulan daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,84-6,52	5,84-6,52	8,1
			16	Produktifitas Total Daerah	Rp./ Angkatan Kerja	77.346.122	77.346.122	
7	Peningkatan Pelestarian Lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	17	IKLH	point	72,84	72,84	
			18	Potensi Pemertuan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1,347	1,347	

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4
Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023

Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
		2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur daerah	3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
				Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata
				Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata



Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
		5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
4	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	6	Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan Pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
		8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		9	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan peran masyarakat dan Lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan Peningkatan pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
5	Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan kemaritiman
		11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penguatan upaya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

3.2.1 Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian RPJMD tahun 2018-2023, dengan Sasaran Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 6

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					
		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	75
				Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen	90
				Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persen	90
				Persentase Temuan Material	Persen	0
		2	Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	72,84
				Indeks kualitas air	Poin	55
				Indeks kualitas udara	Poin	88,97
				Indeks kualitas air laut	Poin	72,50
				Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan	%	100
				Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	%	30
		3	Menurunnya emisi gas rumah kaca (sektor limbah)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	0,28
		4	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, limbah Beracun dan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	50
				Persentase peningkatan penanganan limbah infeksius menjadi abu	%	100
				Persentase peningkatan pengelolaan limbah B3	%	100
		5	Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	%	49
		6	Meningkatnya tata Kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	Presentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	%	100
				Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan dikeluarkan rekomendasinya	%	100
2	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan			Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi	Ha	1.780.029
		7	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	58,68



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2023	
	8	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	Persen	0,08
			Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	Ha	12.000
	9	Meningkatnya Akses Legal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persen	9,01
			Persentase Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	Persen	20
	10	Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan	Persentase Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Persen	64,67
			Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KPH	24

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mencakup 15 (lima belas) program, 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi, misi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada RPJMD tahun 2018-2023.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk pemenuhan perencanaan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menurunkan potensi pencemaran lingkungan dari limbah dan



peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program pengelolaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan sub kegiatan
 - a. Sub kegiatan pengelolaan Kebun Raya

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) bertujuan untuk mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) yang berasal dari aktivitas industri dan medis. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsim, dengan sub kegiatan
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan



V. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan ketaatan badan usaha terhadap kewajiban izin kegiatan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Sub kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH bertujuan untuk fasilitasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat/ lembaga kemasyarakatan tentang lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan



- a. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan pemberian apresiasi dan motivasi kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi atas kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk penyelesaian permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan

X. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk pengembangan penanganan sampah di TPA/TPS regional. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

XI. Program Pengelolaan Hutan



Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan alam produksi secara berkelanjutan dan lestari dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan produksi
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
 - c. Sub kegiatan Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan
3. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - b. Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - c. Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - d. Sub kegiatan Pengembangan Perbenihan tanaman hutan
 - e. Sub kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
 - f. Sub kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
4. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - a. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
 - b. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - c. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan
 - d. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - a. Sub kegiatan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu



6. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - a. Sub kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
7. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
 - a. Sub kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
 - b. Sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
 - c. Sub kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit

XII. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

XIII. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan dengan kegiatan sebagai berikut. :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 - b. Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - c. Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

XIV. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program ini bertujuan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial secara optimal dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
 - b. Sub kegiatan Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
 - c. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

XV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dan kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menurunkan jumlah titik api (hotspot) dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



- d. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan mebel
 - d. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya
 - f. Sub kegiatan Pemeliharaan asset tak berwujud
 - g. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - h. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2023, akan bersumber dari dana APBD dan DBH.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2023 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi pada perubahan rencana kerja tahun 2023, sebagai berikut :



Tabel 10

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							6.012.232.455	6.012.232.455		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP				100%		3.671.972.275	3.671.972.275		
2.11.01.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor				100%		42.500.000	42.500.000		
2.11.01.6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Sulsel		1 Paket		42.500.000	42.500.000	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							3.629.472.275	3.629.472.275		
2.11.01.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		Makassar		1 unit kerja		3.629.472.275	3.629.472.275	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup				100%		570.562.500	570.562.500		
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang ditetapkan				1 dokumen		343.534.000	343.534.000		
2.11.02.1.01.0002	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH provinsi yang disusun		Sulsel		1 dokumen		343.534.000	343.534.000	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi				1 dokumen		227.028.500	227.028.500		
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun		Sulsel		1 dokumen		227.028.500	227.028.500	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah				5,4 Ton penurunan emisi Co2 eq		544.200.480	544.200.480		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan Emisi GRK				9.929 ton		473.316.180	473.316.180		
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Sulsel		1 dokumen		161.656.100	161.656.100	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		Sulsel		1 dokumen		50.000.000	50.000.000	Instansi Pemerintah	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan		Sulsel		1 dokumen		261.660.080	261.660.080	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan				3 lokasi		70.884.300	70.884.300		
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		Sulsel		1 dokumen		70.884.300	70.884.300	Instansi Pemerintah	PAD
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KeHaTi)				100%		40.171.700	40.171.700		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keaneekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola				350 jenis		40.171.700	40.171.700		
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi		Maros		27 ha		40.171.700	40.171.700		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola				98%		469.897.800	469.897.800		
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola				4500000 ton		469.897.800	469.897.800		
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sulsel		1 dokumen		34.104.600	34.104.600	Instansi Pemerintah, Swasta	PAD
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		Sulsel		1 dokumen		435.793.200	435.793.200	Instansi Pemerintah, Swasta	PAD
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH				26%		142.853.400	142.853.400		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				17 usaha/ kegiatan		142.853.400	142.853.400		
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		Sulsel		7 dokumen		50.000.000	50.000.000	Instansi Pemerintah, Swasta	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
2.11.06.1.01.0003	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah provinsi		Sulsel		65 laporan		92.853.400	92.853.400	Instansi Pemerintah, Swasta	PAD
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				100%		40.718.000	40.718.000		
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi				19%		40.718.000	40.718.000		
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Sulsel		1 dokumen		40.718.000	40.718.000	Instansi Pemerintah, Masyarakat	PAD
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH				100%		102.945.400	102.945.400		
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH				154 Instansi, Lembaga dan Organisasi		102.945.400	102.945.400	Instansi Pemerintah, Masyarakat	PAD
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Sulsel		1 dokumen		102.945.400	102.945.400		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan				138 penghargaan		108.371.600	108.371.600		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				5 rekomendasi		108.371.600	108.371.600		
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Sulsel		138 entitas		108.371.600	108.371.600	Instansi Pemerintah, Swasta	PAD
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				100%		126.004.600	126.004.600		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindakan lanjut kasus/ perkara LH yang ditangani				20 rekomendasi		126.004.600	126.004.600		
2.11.10.1.01.0001	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani		Sulsel		20 dokumen		73.750.800	73.750.800	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
2.11.10.1.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Sulsel		14 dokumen		52.253.800	52.253.800	Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat	PAD
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani				74%		194.534.700	194.534.700		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional				100%		194.534.700	194.534.700		
2.11.11.1.01.0001	Penyusunan rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun dan ditetapkan		Sulsel		0 dokumen		46.440.600	46.440.600	Instansi Pemerintah,	PAD
		Jumlah laporan rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun				1 laporan					
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan		Sulsel		1 dokumen		148.094.100	148.094.100	Instansi Pemerintah,	PAD
3	Urusan Pemerintahan Pilihan										
03.28	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan							90.544.604.118	90.544.604.118		
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi kegiatan perangkat daerah, % ASN perangkat daerah berinerja baik, % penurunan temuan berdasarkan LHP				100%		84.190.967.718	84.190.967.718		
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				100%		605.137.700	605.137.700		
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Makassar		2 dokumen		275.719.900	275.719.900	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Makassar		2 dokumen		88.673.700	88.673.700	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Makassar		2 dokumen		10.744.700	10.744.700	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Makassar		2 dokumen		14.227.800	14.227.800	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Makassar		2 dokumen		19.080.000	19.080.000	Instansi Pemerintah,	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Makassar		3 dokumen		16.439.800	16.439.800	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Makassar		4 laporan		180.251.800	180.251.800	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu				100%		68.977.444.611	68.977.444.611		
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Makassar		821 orang/bulan		68.733.232.111	68.733.232.111	ASN	PAD
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Makassar		1 dokumen		500.000	500.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Makassar		1 laporan		107.032.300	107.032.300	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Makassar		3 dokumen		70.176.400	70.176.400	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Makassar		14 laporan		66.503.800	66.503.800	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah				2 dokumen		420.555.200	420.555.200		
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Makassar		20 dokumen		359.571.000	359.571.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Makassar		1 laporan		59.084.200	59.084.200	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Makassar		2 laporan		900.000	900.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Makassar		16 laporan		1.000.000	1.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN				90%		60.611.800	60.611.800		
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Makassar		1 dokumen		60.611.800	60.611.800	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor				100%		2.342.348.800	2.342.348.800		
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Makassar		17 jenis		52.545.000	52.545.000	Instansi Pemerintah,	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan		Makassar		26 paket		4.729.500	4.729.500	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Makassar		26 paket		411.764.700	411.764.700	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Makassar		26 paket		411.475.000	411.475.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makassar		12 laporan		40.362.000	40.362.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makassar		150 laporan		1.382.907.400	1.382.907.400	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Makassar		14 dokumen		38.565.200	38.565.200	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100%		114.950.000	114.950.000		
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Makassar		12 unit		50.000.000	50.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang Disediakan		Makassar		23 unit		44.950.000	44.950.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Makassar		3 unit		20.000.000	20.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%		8.842.892.569	8.842.892.569		
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Makassar		1 laporan		821.850.172	821.850.172	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Makassar		1 laporan		488.213.499	488.213.499	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Makassar		1 laporan		7.532.828.898	7.532.828.898	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik				100%		2.827.027.038	2.827.027.038		
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Makassar		13 unit		1.686.563.560	1.686.563.560	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Makassar		156 unit		507.063.478	507.063.478	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Makassar		15 unit		4.750.000	4.750.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Makassar		85 unit		57.850.000	57.850.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Makassar		2 unit		10.000.000	10.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Makassar		1 unit		20.000.000	20.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Makassar		4 unit		510.800.000	510.800.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Makassar		3 unit		30.000.000	30.000.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi				65,67%		5.700.399.900	5.700.399.900		
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan				92336 m3					
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun				14,82%					
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu				283 ton					
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya				1.780.029 ha		32.480.000	32.480.000		
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi		Makassar		1 dokumen		32.480.000	32.480.000	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan				Rp.25000000		408.336.600	408.336.600		
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		Bone, Gowa, Maros		4 dokumen		60.816.600	60.816.600	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		Bone, Gowa, Maros		10 dokumen		47.520.000	47.520.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.03.0009	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan		Bone		1 lokasi		300.000.000	300.000.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara				1.571 ha		3.375.593.900	3.375.593.900		
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		Makassar		1 dokumen		48.437.200	48.437.200	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		450 ha		1.954.575.000	1.954.575.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		60 ha		498.750.000	498.750.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.0006	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		25.000 batang		654.314.500	654.314.500	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		1 laporan		46.222.200	46.222.200	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Takalar, Wajo, Palopo, Luwu Timur		20 ha		173.295.000	173.295.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani				100%		1.597.965.200	1.597.965.200		
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		1.780.029 ha		1.378.195.200	1.378.195.200	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		1.780.029 ha		91.900.000	91.900.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Sulsel		8 laporan		75.880.000	75.880.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		Sulsel		6 laporan		51.990.000	51.990.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin				3 izin		67.009.200	67.009.200		
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH		Sulsel		3 unit manajemen		67.009.200	67.009.200	Instansi Pemerintah, Swasta Masyarakat	PAD
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu				28.155,17 m3		60.190.000	60.190.000		
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi		Sulsel		30 dokumen		60.190.000	60.190.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan				95 pemohon		158.825.000	158.825.000		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi		Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Toraja Utara		14 unit usaha		58.965.000	58.965.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan		Jeneponto, Luwu, Maros, Pinrang, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara		7 sertifikat		49.930.000	49.930.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan		Gowa, Jeneponto, Maros, Pinrang, Selayar, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara		7 sertifikat		49.930.000	49.930.000	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata				2 jenis		63.406.800	63.406.800		
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi				100 penangkar		63.406.800	63.406.800		
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara		1 laporan		63.406.800	63.406.800	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat	PAD
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan				16,76%		414.560.700	414.560.700		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya				60 orang		414.560.700	414.560.700		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHK PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Parepare, Palopo, Luwu Timur		200 orang		135.819.700	135.819.700	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat, penyuluh kehutanan	PAD
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Selayar, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Palopo, Luwu Timur		169 kelompok		138.201.800	138.201.800	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat, penyuluh kehutanan	PAD
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Wajo, Parepare, Palopo, Luwu Timur, Toraja Utara		2.000 ha		140.539.200	140.539.200	Instansi Pemerintah, Swasta kelompok masyarakat, penyuluh kehutanan	PAD
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi				2 DAS		175.269.000	175.269.000		
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang direhabilitasi				4 DAS		175.269.000	175.269.000		
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan		Makassar		1 dokumen		77.453.500	77.453.500	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS		Makassar		1 dokumen		77.948.500	77.948.500	Instansi Pemerintah,	PAD
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		Makassar		1 lembaga		19.867.000	19.867.000	Instansi Pemerintah,	PAD
JUMLAH								96.556.836.573	96.556.836.573		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran dan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan strategis tahunan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja perubahan tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (RKAP dan DPPA tahun 2023) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Selain itu rencana kerja perubahan 2023 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.